

SALINAN



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 82 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 79 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 79 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan daerah.
  - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
  - (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
    - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
    - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
    - c. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
      1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
      2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
    - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
    - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang ...

- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; atau
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada ormas yang berbadan hukum yayasan atau ormas yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah;
  - d. memiliki sekretariat tetap;
  - e. memiliki ...

- e. memiliki rekening atas nama badan dan lembaga;  
dan
- f. persyaratan lain yang ditentukan SKPD.

(2) Hibah kepada ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- c. memiliki sekretariat tetap;
- d. memiliki rekening Bank atas nama organisasi kemasyarakatan;
- e. persyaratan lain yang ditentukan oleh SKPD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e diatur oleh Kepala SKPD.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 13 huruf b) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

(1) Besaran hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang diberikan kepada :

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- b. badan dan lembaga yang bergerak dalam bidang :
  - 1. dewan koperasi paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 2. keagamaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 3. pemberdayaan perempuan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4. dewan ...

4. dewan pendidikan dan organisasi profesi paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. keolahragaan non profesional paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
6. keolahragaan non profesional dengan adanya kegiatan tertentu paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
7. seni budaya dan adat istiadat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. lingkungan hidup paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. kesehatan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. pemberdayaan lanjut usia paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
11. pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
12. pendidikan non formal dan informal :
  - a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sejenisnya :
    - 1) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
    - 2) pembangunan ruang kelas paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
    - 3) pengadaan alat permainan edukatif paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) :
    - 1) penyelenggaraan kelompok belajar :
      - a) Paket A paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
      - b) Paket B ...



- b) Paket B paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c) Paket C paling banyak Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Kelompok Belajar Usaha (KBU) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) Keaksaraan Usaha Mandiri paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) sarana prasarana paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 5) Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 6) fasilitasi keaksaraan dasar paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) fasilitasi keaksaraan lanjutan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 8) pengembangan PKBM paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 9) fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 10) fasilitasi penguatan manajemen desa vokasi paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

### 13. peternakan

a) usaha ...

- a) usaha ternak sapi paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b) usaha ternak kambing paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) usaha ternak unggas paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d) pengadaan sarana produksi peternakan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

14. pertanian dan perkebunan terdiri dari :

- a) pengadaan prasarana alat mesin pertanian paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b) pengadaan benih dan pupuk paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c) usaha budidaya pertanian paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d) usaha perkebunan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- e) usaha kehutanan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f) jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

15. pemberdayaan pemuda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. ormas berbadan hukum Indonesia berbentuk yayasan/perkumpulan yang bergerak dalam bidang :

- 1. perekonomian paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2. usaha mikro atau kecil atau koperasi wilayah Kabupaten paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. peternakan ...

3. peternakan
  - a) usaha ternak sapi paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - b) usaha ternak kambing paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c) usaha ternak unggas paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - d) pengadaan sarana produksi peternakan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. pertanian dan perkebunan terdiri dari :
  - a) pengadaan prasarana alat mesin pertanian paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - b) pengadaan benih dan pupuk paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c) usaha budidaya pertanian paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d) usaha perkebunan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - e) usaha kehutanan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - f) jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. perikanan
  - a) kelompok pembudidaya ikan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - b) kelompok usaha bersama nelayan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c) kelompok pengolah dan pemasar ikan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d) kelompok ...

- d) kelompok usaha garam rakyat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 6. seni budaya dan adat istiadat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 7. usaha pariwisata paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 8. pemberdayaan pemuda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 9. kelompok olah raga masyarakat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 10. pemberdayaan perempuan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11. lingkungan hidup paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 12. pendidikan terdiri dari :
  - a) PAUD dan sejenisnya :
    - 1) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
    - 2) pembangunan ruang kelas paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
    - 3) pengadaan alat permainan edukatif paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b) SD/MI :
    - 1) pembangunan ruang kelas paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per sekolah;
    - 2) pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per sekolah;
    - 3) pengadaan alat olah raga paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;

4) pengadaan ...

- 4) pengadaan buku perpustakaan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
  - 5) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per sekolah;
  - 6) pengadaan komputer paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per sekolah;
  - 7) rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per sekolah.
- c) SMP/MTs :
- 1) pembangunan ruang kelas paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
  - 2) pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
  - 3) pembangunan ruang laboratorium paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
  - 4) pengadaan alat olah raga paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
  - 5) pengadaan buku perpustakaan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
  - 6) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
  - 7) pengadaan komputer paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per sekolah;
  - 8) rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
  - 9) rehabilitasi ...

9) rehabilitasi ruang laboratorium paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah.

d) SMA/SMK/MA :

1) pembangunan ruang kelas paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per sekolah;

2) pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per sekolah;

3) pembangunan ruang laboratorium paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per sekolah;

4) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah;

5) pengadaan komputer paling banyak Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per sekolah;

6) pengadaan alat bengkel SMK paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

7) rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah;

8) rehabilitasi ruang laboratorium paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah.

e) Perguruan Tinggi paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

13. keagamaan terdiri dari :

a) lembaga pendidikan nonformal keagamaan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b) organisasi keagamaan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Besaran hibah ormas yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Besaran hibah berupa barang dan/atau jasa disesuaikan standar satuan harga biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standar satuan harga pengadaan barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Besaran hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 17 Juli 2018  
BUPATI PATI,  
Ttd.  
HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 17 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,  
Ttd.  
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM  
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010